

OWNERSHIP ANALYSIS: IMPLICATIONS AND IMPACT IN ISLAMIC SOCIAL AND ECONOMIC CONTEXT

¹ Fildzah Hani*, ² Vinni Febriana, ³ Rizqa Amelia
^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*fildzahh610@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to analyze the role of ownership and its impact in the social and economic context. Ownership is a concept that is closely related to individual or group rights to an asset, property or resource. This paper explains that ownership has a broad and significant meaning to society and the economy. In a social context, ownership can affect the structure of power and distribution of resources. Owners have control over their assets or property, which can affect power relations in society. Wealthy and influential owners tend to have greater access to opportunities and resources, whereas those with less leverage may face limitations and injustices. In the economic context, ownership has a crucial role in driving market activity and economic development. Business owners and productive assets drive investment and innovation, which can create jobs, economic growth and prosperity. However, unequal or monopoly ownership can affect competition, income distribution, and economic inequality.

Keyword: *Ownership, Social, Economy*

ANALISIS KEPEMILIKAN: IMPLIKASI DAN DAMPAK DALAM KONTEKS SOSIAL DAN EKONOMI ISLAM

¹ Fildzah Hani*, ² Vinni Febriana, ³ Rizqa Amelia
^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*fildzahh610@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemilikan dan dampaknya dalam konteks sosial dan ekonomi. Kepemilikan merupakan konsep yang terkait erat dengan hak individu atau kelompok atas suatu aset, properti, atau sumber daya. Tulisan ini menjelaskan bahwa kepemilikan memiliki implikasi yang luas dan signifikan terhadap masyarakat dan ekonomi. Dalam konteks sosial, kepemilikan dapat mempengaruhi struktur kekuasaan dan pembagian sumber daya. Pemilik memiliki kontrol atas aset atau properti mereka, yang dapat memengaruhi relasi kekuasaan dalam masyarakat. Pemilik yang kaya dan berpengaruh cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap

kesempatan dan sumber daya, sedangkan mereka yang kurang beruntung mungkin menghadapi keterbatasan dan ketidakadilan. Dalam konteks ekonomi, kepemilikan memiliki peran krusial dalam menggerakkan aktivitas pasar dan pembangunan ekonomi. Pemilikan bisnis dan aset produktif mendorong investasi dan inovasi, yang dapat menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kemakmuran. Namun, kepemilikan yang tidak merata atau monopoli dapat mempengaruhi persaingan, distribusi pendapatan, dan ketidaksetaraan ekonomi.

Kata Kunci: *Kepemilikan, Sosial, Ekonomi*

PENDAHULUAN

Kepemilikan adalah konsep yang melibatkan hak seseorang atau entitas terhadap suatu barang, properti, atau aset. Dalam konteks ini, artikel ini akan membahas tentang kepemilikan dan pentingnya dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk properti, bisnis, dan hukum. Kepemilikan merupakan dasar dari sistem hukum dan ekonomi di banyak negara. Hak kepemilikan memberikan individu atau entitas hak-hak tertentu untuk menggunakan, mengendalikan, dan mentransfer barang atau aset tersebut sesuai dengan kehendak mereka. Dalam Islam diwajibkan seluruh manusia untuk menjaga hak miliknya. Rasulullah SAW bersabda:

تهى رسول الله عن اضاءة المال

Artinya: "Rasulullah SAW melarang membuang-buang harta". (HR. Bukhori dan Muslim).

Konsep kepemilikan juga berkaitan erat dengan tanggung jawab hukum yang timbul dari kepemilikan tersebut. Tulisan ini akan melihat berbagai aspek kepemilikan. Pertama, akan dibahas tentang kepemilikan properti, yang melibatkan hak seseorang atas tanah, bangunan, atau harta lainnya. Kepemilikan properti seringkali menjadi aset yang berharga dan bisa memberikan keuntungan finansial serta kestabilan ekonomi bagi pemiliknya. Selanjutnya, artikel ini akan membahas kepemilikan dalam konteks bisnis. Dalam dunia bisnis, kepemilikan seringkali terkait dengan pemilik usaha atau pemegang saham yang memiliki hak untuk mengendalikan dan mengambil keputusan terkait perusahaan. Kepemilikan bisnis juga berdampak pada bagaimana laba dan kerugian didistribusikan serta pada tanggung jawab hukum yang melekat pada pemiliknya. Tidak hanya itu, artikel ini juga akan mengulas tentang kepemilikan dalam konteks hukum. Hukum kepemilikan melibatkan peraturan dan regulasi yang mengatur hak-hak dan kewajiban pemilik terhadap barang atau aset yang dimilikinya. Hal ini dapat mencakup pemindahan kepemilikan, perjanjian kontrak, dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan seseorang.

Selain itu, penting untuk menjelaskan tentang kepemilikan kolektif, di mana kepemilikan dimiliki oleh beberapa individu atau kelompok. Kepemilikan kolektif dapat terjadi dalam bentuk kepemilikan bersama, seperti kepemilikan bersama properti atau bisnis, atau dalam bentuk kepemilikan publik, di mana aset atau barang dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana di dalam hadits yang menyatakan tentang kepemilikan publik.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ الْمُسْلِمُونَ شُرُكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْثِ ۖ هَذَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَوْمَ الْمَاءِ الْجَارِيِّ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput dan api, dan harganya adalah haram. Abu Sa’id berkata, Yang dimaksud adalah air yang mengalir.” (HR Ibn Majah).

Karya tulis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep kepemilikan dan menggali pentingnya dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam melakukannya, pembaca diharapkan dapat mengenali nilai dan implikasi dari kepemilikan serta memahami peran dan tanggung jawab yang terkait dengan hak kepemilikan. Selanjutnya, artikel ini akan mengeksplorasi beberapa isu dan tantangan yang terkait dengan kepemilikan, seperti konflik kepemilikan, perlindungan hukum terhadap kepemilikan, dan perubahan dalam paradigma kepemilikan dalam era modern. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kepemilikan, pembaca diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik sebagai pemilik properti, pengusaha, atau warga negara yang bertanggung jawab.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mensandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis dan faktual dengan penyusunan yang akurat.

Menggunakan metode kualitatif dalam penelitian atau analisis memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu peneliti atau analis dalam memahami fenomena yang sedang dipelajari. Beberapa keuntungannya yaitu Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Dengan menggunakan wawancara, observasi, atau analisis isi, peneliti dapat menggali makna dan pemahaman yang lebih dalam dari perspektif individu atau kelompok yang terlibat dalam penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan konteks dan kompleksitas yang mungkin tidak terlihat melalui metode kuantitatif, metode kualitatif bersifat fleksibel, yang berarti peneliti dapat menyesuaikan pendekatan dan prosedur penelitian mereka seiring berjalannya penelitian. Peneliti dapat memperdalam atau mengubah pertanyaan penelitian mereka, menyesuaikan metode pengumpulan data, atau memperluas wilayah penelitian mereka jika diperlukan. Fleksibilitas ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam dan mengeksplorasi aspek yang relevan dan menarik dari fenomena yang sedang dipelajari.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis kepemilikan memiliki implikasi dan dampak yang signifikan dalam konteks sosial dan ekonomi. Dalam analisis kepemilikan, fokus utamanya adalah pada siapa yang memiliki sumber daya, aset, atau modal dalam suatu sistem ekonomi atau masyarakat. Berikut adalah hasil dan pembahasan tentang analisis kepemilikan dan implikasi serta dampaknya dalam konteks sosial dan ekonomi.

Implikasi Sosial:

- **Ketimpangan Ekonomi:** Kepemilikan yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Jika kepemilikan terkonsentrasi pada sejumlah kecil individu atau kelompok, maka mereka akan memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan mayoritas penduduk. Hal ini dapat memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelas sosial yang berbeda.
- **Akses dan Kesetaraan:** Kepemilikan yang tidak merata juga dapat mempengaruhi akses dan kesetaraan dalam masyarakat. Jika sebagian besar sumber daya atau aset dimiliki oleh segelintir orang, maka orang lain mungkin mengalami kesulitan untuk mengakses sumber daya tersebut. Ini dapat menghambat kesempatan yang adil dan kesetaraan dalam masyarakat.
- **Pengaruh Politik:** Kepemilikan yang terkonsentrasi juga dapat memberikan pengaruh politik yang besar pada kebijakan dan pengambilan keputusan. Pemilik yang kaya dan berpengaruh dapat menggunakan kekayaan mereka untuk mempengaruhi kebijakan publik sesuai dengan kepentingan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dan menghambat demokrasi dalam masyarakat.

Implikasi Ekonomi:

- **Efisiensi Ekonomi:** Kepemilikan yang beragam dan terdistribusi dengan baik dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Dalam sistem yang adil dan seimbang, lebih banyak individu atau kelompok memiliki akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Ini memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan potensi penuh mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
- **Investasi dan Inovasi:** Kepemilikan yang lebih merata juga dapat mendorong investasi dan inovasi. Jika lebih banyak individu memiliki akses ke modal dan sumber daya, mereka dapat menggunakannya untuk memulai bisnis baru, meningkatkan keterampilan mereka, atau mengembangkan teknologi baru. Hal ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- **Distribusi Pendapatan:** Kepemilikan yang adil dapat berkontribusi pada distribusi pendapatan yang lebih merata dalam masyarakat. Ketika sumber daya dan keuntungan didistribusikan secara luas, pendapatan dapat didistribusikan dengan lebih baik, mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Ini dapat menciptakan stabilitas sosial, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mengurangi ketegangan sosial.

Implikasi sosial dari kepemilikan yang tidak merata meliputi ketimpangan ekonomi, akses terbatas, dan pengaruh politik yang tidak seimbang. Sementara itu, implikasi ekonomi mencakup efisiensi ekonomi, investasi, inovasi, dan distribusi pendapatan. Kepemilikan yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Ketika kepemilikan terkonsentrasi pada sejumlah kecil individu atau kelompok, mereka memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan mayoritas penduduk. Hal ini dapat memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelas sosial yang berbeda. Dalam konteks ini, analisis kepemilikan dapat membantu mengidentifikasi sejauh mana ketimpangan ini terjadi dan mengapa terjadi, sehingga memungkinkan perencanaan dan kebijakan yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini. (Akbar, 2019)

Selain itu, kepemilikan yang tidak merata juga mempengaruhi akses dan kesetaraan dalam masyarakat. Jika sebagian besar sumber daya atau aset dimiliki oleh segelintir orang, orang lain mungkin mengalami kesulitan untuk mengakses sumber daya tersebut. Hal ini dapat menghambat kesempatan yang adil dan kesetaraan dalam masyarakat. Analisis kepemilikan dapat membantu mengidentifikasi ketidakadilan ini dan mendukung langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan akses dan meningkatkan kesetaraan. Pengaruh politik juga merupakan implikasi sosial yang signifikan dari kepemilikan yang tidak merata. Pemilik yang kaya dan berpengaruh dapat menggunakan kekayaan mereka untuk mempengaruhi kebijakan publik sesuai dengan kepentingan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dan menghambat demokrasi dalam masyarakat. Analisis kepemilikan dapat membantu mengungkap pengaruh politik ini dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengaruh tersebut dapat diatasi atau dikendalikan untuk mencapai tatanan yang lebih adil dan inklusif.

Di sisi lain, kepemilikan yang lebih merata memiliki implikasi ekonomi yang menguntungkan. Kepemilikan yang beragam dan terdistribusi dengan baik dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Dalam sistem yang adil dan seimbang, lebih banyak individu atau kelompok memiliki akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Ini memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan potensi penuh mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. (Pane et al., 2022) Selain itu, kepemilikan yang lebih merata juga dapat mendorong investasi dan inovasi. Jika lebih banyak individu memiliki akses ke modal dan sumber daya, mereka dapat menggunakannya untuk memulai bisnis baru, meningkatkan keterampilan mereka, atau mengembangkan teknologi baru. Hal ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Distribusi pendapatan juga dipengaruhi oleh kepemilikan yang merata. Kepemilikan yang adil dapat berkontribusi pada distribusi pendapatan yang lebih merata dalam masyarakat. Ketika sumber daya dan keuntungan didistribusikan secara luas, pendapatan dapat didistribusikan dengan lebih baik, mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Ini dapat menciptakan stabilitas sosial, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mengurangi ketegangan sosial. Kepemilikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, bahkan hubungan-hubungan hak milik akan menentukan suatu sistem ekonomi. Dua sistem ekonomi yang telah mapan yaitu kapitalisme dan sosialisme memiliki pandangan yang berbeda mengenai hak milik. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang lebih mementingkan hak individu dan mengesampingkan kepentingan masyarakat umum. Pelaku ekonomi bersifat individu dan bebas untuk mengusahakan keberhasilan ekonomi dengan cara yang dikehendaknya. Sebaliknya, dalam pandangan sosialisme justru meniadakan hak kepemilikan individu. (Hariman Surya Siregar, 2009)

Dalam sosialisme sumber daya ekonomi adalah kepemilikan kolektif masyarakat atau negara, sehingga individu-individu tidak berhak untuk memilikinya. Jadi, masyarakat atau negara berada di atas individu. Kedua sistem ekonomi ini memiliki implikasi yang serius terhadap perekonomian, kapitalisme telah menimbulkan permasalahan yang rumit bagi masyarakat. Pengutamaan hak-hak individu dalam kapitalisme sering kali memunculkan konflik kepentingan antar-anggota masyarakat. Dalam konflik seperti ini biasanya masyarakat miskin akan dikalahkan oleh kelompok kaya yang menguasai sumber daya ekonomi lebih banyak. Di sisi lain, penghapusan hak-hak individu secara ekstrem dalam sosialisme jelas bertentangan dengan fitrah dasar manusia. Masyarakat menjadi kurang termotivasi untuk beraktivitas (dalam perekonomian), sebab seluruh tujuan dan kinerja ekonomi biasanya akan dikalahkan oleh tujuan yang lebih bersifat sosial. Tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sering kali dilakukan dengan mengabaikan pertimbangan individu-individu, yang sesungguhnya merupakan elemen dari masyarakat itu sendiri. Dalam praktiknya, penggunaan otoritas negara dalam sosialisme sering kali juga ditunggangi oleh

kepentingan-kepentingan non-ekonomi, seperti politik oleh pemerintah yang berkuasa. Pengutamaan hak-hak sosial dengan mengabaikan hak-hak individu memang berpotensi untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan kekayaan, tetapi juga menimbulkan rasa ketidakadilan dan cenderung mengabaikan efisiensi ekonomi. Islam memiliki pandangan yang berbeda dengan sistem kapitalis dan sosialis. Setiap orang dalam Islam memandang secara individu, bukan secara kolektif sebagai kelompok yang hidup dalam suatu negara. (Ahmad Junaedi, 2019)

Setiap manusia dalam pandangan Islam, berhak untuk memiliki suatu harta atau berhak mendapatkan pengalihan hak penguasaan/pemilikan atas suatu harta dari harta milik Allah. Seperti Firman Allah dalam QS. Al-Hadid: 7 yang bunyinya:

أَمِنُوا بِآيَاتِنَا وَآمِنُوا بِرُسُلِنَا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَبِعُوا آيَاتِنَا لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ۗ وَآمِنُوا بِهَدَايَاتِنَا وَأَطِيعُوا أَمْرِنَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۗ

Artinya: Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.

Selain mengakui kepemilikan individu, Islam juga mengatur pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan umum (collective property), terlebih jika kekayaan milik umum tersebut tidak dapat dengan mudah dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu masyarakat karena membutuhkan keahlian, teknologi tinggi. Setidaknya ada dua keuntungan yang akan diperoleh negara dari pengelolaan kepemilikan umum tersebut, yaitu diperolehnya sumber pemasukan bagi anggaran belanja negara yang cukup besar untuk mencukupi berbagai kebutuhan negara. Selain itu, negara diharapkan mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap utang luar negeri dalam pembiayaan pembangunan negara. Keuntungan dari pengelolaan harta pemilikan umum juga dapat digunakan negara untuk belanja segala keperluan yang berkenaan dengan kegiatan operasional negara baik dari segi administrasi, perencanaan, eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemasaran, dan distribusi. Negara juga dapat mengembalikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk pemberian subsidi kepada rakyat. Dalam hal ini pemerintah boleh membagikan air minum, listrik, gas, minyak tanah, dan barang lain untuk keperluan rumah tangga atau pasar-pasar secara gratis atau menjualnya dengan semurah-murahnya, atau dengan harga wajar yang tidak memberatkan. Barang-barang tambang yang tidak dikonsumsi rakyat, misalnya minyak mentah, dijual ke luar negeri dan keuntungannya dibagi kepada seluruh rakyat, dalam bentuk uang, barang, atau untuk membangun sekolah-sekolah gratis, rumah-rumah sakit gratis, dan pelayanan umum lainnya, juga untuk menutupi anggaran yang wajib dipenuhi negara seperti anggaran belanja untuk pertahanan negara dan yang lainnya. (Andiko, 2016)

KESIMPULAN

Dalam kesimpulannya, analisis kepemilikan memiliki implikasi dan dampak yang signifikan dalam konteks sosial dan ekonomi. Kepemilikan yang terkonsentrasi dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, akses terbatas, dan pengaruh politik yang tidak seimbang. Sementara itu, kepemilikan yang lebih merata dapat

meningkatkan efisiensi ekonomi, mendorong investasi dan inovasi, serta memperbaiki distribusi pendapatan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong kebijakan dan tindakan yang mempromosikan kepemilikan yang lebih merata dalam rangka mencapai masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Junaedi. (2019). *Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Prespektif Islam Ekonomi*. 9(01), 7–8.

Akbar, A. (2019). Harta dan kepemilikan. *Jurnal Al-Iqtishod*, 3(2), 1–16.

Andiko, T. (2016). Konsep harta dan pengelolaannya dalam alquran. *Al-Intaj*, 2(1), 57–70.

Hariman Surya Siregar, K. K. (2009). Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi. In *Nucl. Phys*.

Isnaini, dkk. (2021). *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

Nasrun Harun. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pramana.

Pane, I., Syazali, H., Halim, S., Asrofi, I., Is, M. F., Saleh, M., & ... (2022). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*.
<https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=XCduEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA38%5C&dq=tabdzir+indonesia+makanan%5C&ots=oCAhfflgEa%5C&sig=Gywab7PzJcj7GRRx5wPWpG8hT9Q>

Sudiarti Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.